

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara berkembang termasuk Indonesia berfokus pada masalah kemiskinan sebagai salah satu hambatan utama untuk kemajuan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2011:16) pembangunan adalah upaya untuk mencapai pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan sehingga suatu negara dapat meningkatkan produksinya lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang kuat merupakan salah satu tujuan pembangunan setiap negara.

Hasil dari upaya pembangunan sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan ini merupakan hal yang umum terjadi. Hal ini disebabkan pembangunan dilakukan hanya untuk mencapai pertumbuhan PDB yang tinggi, dengan mengabaikan faktor lainnya. Dalam hal tersebut, masalah muncul karena kesalahan dalam upaya pembangunan, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, distribusi pendapatan yang tidak merata serta pengaruh lingkungan sosial dan kesenjangan ekonomi yang berlebihan (Widodo, 2006:6).

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum didefinisikan sebagai kemiskinan. Pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) adalah rencana pembangunan global

yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan, dimulai pada tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2030. Dalam hal penurunan angka kemiskinan, program yang diterima masyarakat miskin di Indonesia bisa diklasifikasikan sebagai program perlindungan sosial, yang terdiri dari kebijakan sosial dan ekonomi dengan aspek-aspek penting pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs (Djulius, dkk 2022). Kemiskinan dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Bagi mereka yang dianggap miskin, kemiskinan menjadi hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mengalami dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi fokus utama yang melibatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan dan faktor lainnya.

Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam mengurangi kemiskinan selama sepuluh tahun terakhir. Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pembangunan ekonomi merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia (Sumarto,2014). Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan difokuskan untuk membangun wilayah, terutama daerah yang tertinggal. Menetapkan dasar dan tujuan pembangunan nasional melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, serta mengkoordinasikan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu, angka penurunan kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara.

Table 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Periode Semester 2 (September), Tahun 2018-2021

Provinsi	2018	2019	2020	2021
Aceh	15,68	15,01	15,43	15,53
Sumatera Utara	8,94	8,63	9,14	8,49
Sumatera Barat	6,55	6,29	6,56	6,04
Riau	7,21	6,9	7,04	7,00
Jambi	7,85	7,51	7,97	7,67
Sumatera Selatan	12,82	12,56	12,98	12,79
Bengkulu	15,41	14,91	15,3	14,43
Lampung	13,01	12,3	12,76	11,67
Kep. Bangka Belitung	4,77	4,5	4,89	4,67
Kep. Riau	5,83	5,8	6,13	5,75
DKI Jakarta	3,55	3,42	4,69	4,67
Jawa Barat	7,25	6,82	8,43	7,97
Jawa Tengah	11,19	10,58	11,84	11,25
DI Yogyakarta	11,81	11,44	12,8	11,91
Jawa Timur	10,85	10,2	11,46	10,59
Banten	5,25	4,94	6,63	6,50
Bali	3,91	3,61	4,45	4,72
Nusa Tenggara Barat	14,63	13,88	14,23	13,83
Nusa Tenggara Timur	21,03	20,62	21,21	20,44
Kalimantan Barat	7,37	7,28	7,24	6,84
Kalimantan Tengah	5,10	4,81	5,26	5,16
Kalimantan Selatan	4,65	4,47	4,83	4,56
Kalimantan Timur	6,06	5,91	6,64	6,27
Kalimantan Utara	6,86	6,49	7,41	6,83
Sulawesi Utara	7,59	7,51	7,78	7,36
Sulawesi Tengah	13,69	13,18	13,06	12,18
Sulawesi Selatan	8,87	8,56	8,99	8,53
Sulawesi Tenggara	11,32	11,04	11,69	11,74
Gorontalo	15,83	15,31	15,59	15,41
Sulawesi Barat	11,22	10,95	11,5	11,85
Maluku	17,85	17,65	17,99	16,3
Maluku Utara	6,62	6,91	6,97	6,38
Papua Barat	22,66	21,51	21,7	21,82

Provinsi	2018	2019	2020	2021
Papua	27,43	26,55	26,8	27,38
Indonesia	9,66	9,22	10,19	9,71

Sumber: *bps.go.id. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (diolah)*

Tabel 1.1 menunjukkan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2018 hingga 2019 menurun secara signifikan. Pada tahun 2020 meningkat tercatat hingga 10,19 persen karena dikejutkan oleh virus pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia. Bahkan dari setiap provinsi pun jumlah penduduk miskin meningkat pada September 2020. Pada tahun 2021 sedikit menurun menjadi 9,71 persen. Provinsi Bali masih memiliki penduduk miskin, meskipun tingkat kemiskinannya rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Namun, sebagai Provinsi yang unggul dan sebagai ikon pariwisata, sektor pariwisata Provinsi Bali terkena dampak pada saat pandemi *Covid-19* muncul di Indonesia.

Provinsi Bali sendiri masih memiliki penduduk miskin, meskipun kemiskinan di Provinsi Bali tergolong rendah jika dibandingkan kemiskinan Nasional. Dilihat dari urutannya, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan perekonomian yang pesat, namun angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi di berbagai daerah. Provinsi Bali memiliki struktur ekonomi yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunikan ini karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat berasal dari sektor jasa (pariwisata), sedangkan sektor lainnya hanya berfungsi sebagai sektor pendukung (BPS 2003).

Kabupaten/kota di wilayah yang kaya akan dengan potensi ekonomi lebih besar memiliki kemungkinan untuk berkembang lebih cepat daripada yang berada di wilayah dengan potensi ekonomi yang lebih rendah. Dari 9 Kabupaten.Kota di Provinsi Bali Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten yang memiliki peluang sangat baik untuk mengembangkan pariwisata. Selain itu, Kabupaten Tabanan memiliki keunggulan dalam pertanian, sedangkan Kabupaten Gianyar memiliki potensi dalam industry kecil. Kabupaten Karangasem dan Bangli memiliki sumber daya atau potensi ekonomi yang sangat terbatas sehingga menghambat pertumbuhan ekonominya. Meskipun pariwisata dan pertanian merupakan dua sektor yang mampu meningkatkan ekonomi Provinsi Bali, kemiskinan masih menjadi masalah utama.

Table 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	5,20	4,88	4,51	5,06
Kab. Tabanan	4,46	4,21	4,27	5,12
Kab. Badung	1,98	1,78	2,02	2,62
Kab. Gianyar	4,19	3,88	4,08	4,85
Kab. Klungkung	5,86	5,40	4,87	5,64
Kab. Bangli	4,89	4,44	4,19	5,09
Kab. Karangasem	6,28	6,25	5,91	6,78
Kab. Buleleng	5,36	5,19	5,32	6,12
Kota Denpasar	2,24	2,10	2,14	2,96
Provinsi Bali	3,91	3,61	4,45	4,72

Sumber: bali.bps.go.id. Persetase Penduduk Miskin Provinsi Bali (diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2018 hingga 2019 menurun secara signifikan. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,45 persen dan pada 2021 meningkat mencapai 4,72 persen karena adanya virus pandemi *Covid-19*. Kabupaten Karangasem memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yaitu mencapai 6,78 persen pada tahun 2021. Persentase tersebut lebih besar dari angka kemiskinan Provinsi Bali dan juga lebih besar dari 9 Kabupaten/Kota lainnya. Sedangkan Kabupaten Badung merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah yakni hanya 2,62 persen pada tahun 2021. Provinsi Bali didukung oleh beberapa Kabupaten/Kota dengan memiliki banyak potensi, tetapi kemiskinan adalah masih menjadi masalah yang relative klasik. Sektor pariwisata di Pulau Dewata lumpuh akibat munculnya virus pandemi *Covid-19* yang membatasi interaksi sosial.

Perkembangan pariwisata di Provinsi Bali telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mendorong perkembangan sektor nasional seperti transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata), pasar dan lapangan kerja bagi produk pariwisata lokal (industri pariwisata, kerajinan, dan cinderamata), serta mendukung pengembangan daerah terpencil dengan daya tarik regional. Menurut Mill (2000:168-169) menyatakan dalam bukunya, "*The Tourism International Trade*" bahwa pariwisata dapat membawa keuntungan baik bagi wisatawan maupun masyarakat tuan rumah, dan dapat meningkatkan taraf hidup melalui keuntungan ekonomi yang dibawanya ke wilayah tersebut.

Table 1.3 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2018-2021 (Persen)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	12,62	12,53	12,58	12,55
Kab. Tabanan	30,40	17,42	23,91	20,67
Kab. Badung	48,08	46,41	47,25	46,83
Kab. Gianyar	44,86	38,83	41,85	40,34
Kab. Klungkung	58,78	64,24	61,51	62,88
Kab. Bangli	2,98	11,60	7,29	9,45
Kab. Karangasem	24,26	28,58	26,42	27,50
Kab. Buleleng	21,60	19,34	20,47	19,91
Kota Denpasar	27,67	21,65	24,66	23,16
Provinsi Bali	31,06	33,03	32,05	32,54

Sumber: *bali.bps.go.id. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang (diolah)*

Tabel 1.3 menunjukkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel non bintang di Provinsi Bali meningkat signifikan pada tahun 2018 hingga 2019. Penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel non bintang terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi virus *Covid-19* yang melanda negara Indonesia. Pada tahun 2021 sedikit meningkat menjadi 32,54 persen dengan kondisi pemulihan pasca adanya virus pandemi *Covid-19*. Dengan meningkat kembali Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang diharapkan juga dapat meningkatkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di hotel.

Sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan kata lain, daerah tujuan wisata akan memperoleh pendapatan dari Daya Tarik Wisata (DWT) yang merupakan tempat sasaran utama bagi wisatawan. Menurut Sudibya (2000:262), daya tarik alam, daya tarik budaya, dan daya tarik buatan manusia adalah tiga jenis daya tarik wisata. Dengan menjadi sumber pendapatan utama di wilayah pedesaan,

pertumbuhan sektor tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan. Ini dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja baru, kenaikan upah, dan pembangunan infrastruktur yang di kawasan wisata.

Table 1.4 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Pada Kawasan Objek dan Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2018-2021 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	309.508	291.951	83.966	150.985
Kab. Tabanan	5.533.745	4.967.424	1.246.219	756.366
Kab. Badung	4.816.649	4.277.052	1.216.517	603.438
Kab. Gianyar	4.550.940	5.037.459	528.697	178.415
Kab. Klungkung	253.235	503.347	113.491	1.207
Kab. Bangli	703.010	1.230.573	188.265	170.166
Kab. Karangasem	1.410.224	1.165.674	380.200	236.649
Kab. Buleleng	1.003.810	641.242	121.492	63.677
Kota Denpasar	2.081.265	2.166.192	74.781	433.456
Provinsi Bali	20.662.386	20.280.914	3.953.628	2.594.359

Sumber: disparda.baliprov.go.id. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Pada Kawasan Objek dan Daya Tarik Wisata (diolah)

Jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali mengalami tren peningkatan pada tahun 2018 seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.4. Namun, tahun 2019 hingga 2021 jumlah kunjungan wisatawan turun drastis menjadi 2.594.359 jiwa, dan terjadi perubahan jumlah pengunjung di beberapa Kabupaten/Kota. Dalam perencanaan pengelolaan kawasan pariwisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di beberapa daerah di Provinsi Bali disebabkan oleh perbedaan jumlah kawasan atau obyek wisata dan keindahan obyek wisata pada masyarakat setempat. Hal ini penting

untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan jumlah pengunjung.

Sektor ekonomi UMKM sangat potensial dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, karena mereka menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berarti jumlah pengangguran dapat menurun dan pada akhirnya tingkat kemiskinan dapat berkurang (Megawati,2019). UMKM berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi akan mendorong usaha untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, sehingga meningkatkan upah tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Table 1.5 Jumlah UMKM di Provinsi Bali, Tahun 2018-2021 (Unit)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	27.654	24.346	46.277	66.537
Kab. Tabanan	41.459	42.744	43.715	47.160
Kab. Badung	19.688	19.261	22.647	40.989
Kab. Gianyar	75.412	75.482	75.542	75.620
Kab. Klungkung	11.761	14.584	35.792	36.072
Kab. Bangli	44.068	44.068	44.123	44.693
Kab. Karangasem	39.589	40.468	57.456	40.614
Kab. Buleleng	34.552	34.374	54.489	57.216
Kota Denpasar	31.826	32.026	32.224	32.226
Provinsi Bali	326.009	327.353	412.265	441.127

Sumber: diskopukm.baliprov. Data Jumlah UMKM Provinsi Bali (diolah)

Tabel 1.5 menunjukkan perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Bali pada tahun 2018 hingga 2021 terus meningkat. Kabupaten Gianyar merupakan wilayah terbanyak

yang memiliki UMKM. Pada akhir tahun 2019, dikejutkan oleh virus *Covid-19* yang dampaknya dirasakan juga oleh sektor UMKM. Para pengelola UMKM merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Namun, meskipun terdapat virus *Covid-19* jumlah UMKM semakin bertambah karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kabupaten Klungkung wilayah yang memiliki UMKM paling sedikit tetapi berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 hingga 2021 jumlah UMKM di Kabupaten Klungkung terus meningkat, artinya sektor UMKM di Kabupaten Klungkung dalam menopang perekonomian msyarakatnya berkembang dengan baik.

Faktor kunci untuk mengentaskan kemiskinan adalah pendidikan. Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan, ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan, termasuk pendapatan, pendidikan, dan tingkat konsumsi. Pendidikan sangat penting dalam menentukan kepribadian seseorang dibentuk, apakah kepribadian itu baik atau buruk menurut standar normatif. Dengan pendidikan yang memadai, generasi penerus bangsa akan memiliki kualitas yang baik dan mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka meningkatkan produktivitas dan penghasilan pendapatan yang akan membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan.

Table 1.6 Persentase Jumlah Penduduk dengan Pendidikan SMA Keatas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	41,45	72,54	41,44	41,48
Kab. Tabanan	47,69	80,73	48,00	48,15
Kab. Badung	55,72	80,14	55,71	56,79
Kab. Gianyar	50,38	77,26	51,18	50,93
Kab. Klungkung	45,27	77,46	45,95	45,94
Kab. Bangli	41,70	73,06	42,64	42,93
Kab. Karangasem	32,73	60,03	33,79	34,36
Kab. Buleleng	49,43	79,01	49,63	48,79
Kota Denpasar	48,37	64,56	50,17	53,65
Provinsi Bali	48,53	73,02	48,99	50,05

Sumber: bali.bps.go.id. Persentase Jumlah Penduduk dengan Pendidikan SMA Keatas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (diolah)

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2019, persentase jumlah penduduk dengan pendidikan SMA ke atas di Provinsi Bali mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pembatasan sosial yang menghambat segala bentuk aktivitas akibat pandemi virus *Covid-19*. Kabupaten Badung menjadi wilayah tertinggi yang memiliki jumlah penduduk dengan pendidikan SMA keatas, maka Kabupaten Badung termasuk wilayah yang memiliki persentase penduduk miskinnya rendah. Berdasarkan tabel 1.6 juga Kabupaten Karangasem wilayah paling rendah yang memiliki jumlah penduduk dengan pendidikan SMA keatas, artinya kabupaten tersebut termasuk wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin sedikit penduduk miskin.

Peran tenaga kerja dalam menggerakkan suatu perekonomian di suatu negara sangat penting dengan melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Upah minimum yang lebih tinggi akan menyebabkan penurunan tenaga kerja dan peningkatan pengangguran, yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dan ketimpangan (Abdulah, 2013). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang lebih tinggi menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja harus lebih besar untuk menyerap lebih banyak pekerja. Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam suatu wilayah akan menyebabkan kesejahteraan antar masyarakat semakin rendah serta terhambatnya pembangunan di suatu wilayah yang akan menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Tabel 1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2018-2021 (Persen)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	77,30	67,36	75,92	81,26
Kab. Tabanan	77,29	75,42	75,47	74,98
Kab. Badung	71,15	72,60	72,69	72,52
Kab. Gianyar	78,96	76,11	71,27	69,88
Kab. Klungkung	77,87	76,05	75,27	72,83
Kab. Bangli	85,72	83,11	82,20	82,09
Kab. Karangasem	82,28	80,61	80,75	81,15
Kab. Buleleng	76,60	69,51	75,07	73,08
Kota Denpasar	73,52	71,70	70,91	68,67
Provinsi Bali	76,56	73,77	74,32	73,54

Sumber: bali.bps.go.id. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali (diolah)

Tabel 1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Bali dari 2018 hingga 2019 menurun sebagai akibat dari wabah virus *Covid-19* yang melanda Indonesia pada akhir tahun 2019. Pada tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik menjadi 74,3 persen. Pada tahun 2021 kembali turun menjadi 73,54 persen karena masa pemulihan dari virus pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan latar belakang diatas, Bali merupakan wilayah yang unggul dan menjadi *icon* pariwisata. Provinsi Bali juga merupakan salah satu daerah dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi berkembang pesat, angka pengangguran dan penduduk miskin masih tinggi di beberapa Kabupaten/Kota. Selain itu, munculnya virus pandemi *Covid-19* juga berdampak terhadap industri pariwisata di Provinsi Bali. Oleh karena itu penulis berniat untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Dengan demikian, penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata, UMKM, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2015-2021”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah pokok dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK), jumlah kunjungan wisatawan, UMKM, tingkat pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Penghunian Kamar (TPK), jumlah kunjungan wisatawan, UMKM, tingkat pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Penghunian Kamar (TPK), jumlah kunjungan wisatawan, UMKM, tingkat pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Penghunian Kamar (TPK), jumlah kunjungan wisatawan, UMKM, tingkat pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik bersifat akademis maupun praktis. Adapun kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, khususnya dalam kajian ilmu ekonomi yang berkaitan dengan sektor pariwisata, UMKM, tingkat pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Bali. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain di Universitas Pasundan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan lain dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.